

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengungkapan merupakan bentuk penyampaian informasi dari pihak manajemen kepada para pemangku kepentingan. Pengungkapan akuntansi menyediakan bagi para pemangku kepentingan informasi yang dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian dan membantu mereka untuk mengambil keputusan ekonomi dan keuangan yang tepat (Alhazaimeh *et al.* 2013).

Salah satu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi adalah laporan tahunan. Di dalam laporan tahunan terdapat dua jenis pengungkapan yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Menurut Penmann (1980), pengungkapan wajib adalah setiap item keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan yang ditentukan oleh standar akuntansi dan atau peraturan bursa. Alhazaimeh *et al.* (2013) merujuk kepada Botosan (1997), Naser & Nuseibeh (2003), dan Alsaeed (2006) mengatakan bahwa pengungkapan sukarela berarti mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan mengenai operasi perusahaan tanpa persyaratan hukum.

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu prinsip dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yaitu transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan memiliki struktur yang salah satunya terdiri dari dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ inti perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada direksi serta menjamin transparansi yang dilakukan oleh direksi (manajemen) (Achmad 2012). Dewan komisaris juga mengadakan rapat sebagai koordinasi antara anggota dewan komisaris dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas perusahaan. Tingkat pengawasan yang tinggi oleh dewan komisaris diharapkan dapat memperluas pengungkapan sukarela perusahaan.

Dewan komisaris dan direksi dalam melaksanakan tugasnya diberikan imbalan berupa kompensasi setiap tahun. Kompensasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Sumargo 2014). Salah satu bentuk baiknya kinerja perusahaan adalah dengan adanya pengungkapan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Dewan komisaris juga memiliki komite dibawahnya, salah satunya adalah komite audit. Komite audit memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit dalam menjalankan tugasnya juga melakukan rapat koordinasi setiap tahunnya. Semakin sering diadakannya rapat komite audit diharapkan semakin tinggi tingkat pengawasan yang dapat memperluas pengungkapan sukarela perusahaan.

Pengungkapan sukarela memiliki peran yang penting bagi kelangsungan perusahaan. Apabila pengungkapan sukarela dikelola dengan tepat, informasi tentang kondisi perusahaan akan mudah diketahui oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan sukarela dapat dijadikan pertimbangan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Sebaliknya apabila pengungkapan sukarela tidak dikelola dengan tepat pemangku kepentingan akan sulit menduga peristiwa atau kejadian yang mungkin akan merugikan perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi dua kasus yang berakibat pada kerugian dua perusahaan besar. Kasus pertama melanda perusahaan asal Jepang, PT Toshiba. PT Toshiba telah mengalami kerugian hingga 995 miliar yen. Toshiba telah terbukti menggelembungkan laba dalam tujuh tahun terakhir sebesar 1,2 miliar dolar AS yang menyebabkan beberapa CEO dan manajer PT Toshiba mengundurkan diri (Setiawan, "Kompas"). Komite independen PT Toshiba mengatakan bahwa Toshiba membutuhkan perbaikan tata kelola perusahaan (Panji, "CNN Indonesia").

Kerugian yang dialami oleh PT Toshiba tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan sukarela berperan penting untuk meminimalisir risiko kecurangan. Apabila pengungkapan wajib suatu perusahaan dirasa ganjil, pihak-pihak yang berkepentingan dapat menelusuri pengungkapan sukarela untuk memperoleh informasi tambahan.

Kasus lainnya adalah yang terjadi di PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA). Pada akhir bulan Juni 2018 harga saham AISA anjlok hingga menyentuh batas penghentian perdagangan saham otomatis. Hal ini berawal dari kasus yang menimpa anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera yaitu PT IBU yang melakukan kecurangan dalam memproduksi beras dengan mutu yang tidak sesuai dengan kualitas label, dan kasus ini juga menyeret cucu usaha Tiga Pilar lainnya, PT Jatisari Srejeke (JSR). Kasus hukum yang menjerat dua perusahaan tersebut memaksa Tiga Pilar Sejahtera menghentikan bisnis beras. Per 1 Desember 2017, Tiga Pilar menghentikan kegiatan operasional tiga anak usahanya di lini bisnis beras dan memutuskan untuk memutus hubungan kerja karyawan di tiga perusahaan tersebut (Prasetyo, "Kontan").

Kasus yang melanda PT Pilar Sejahtera tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengungkapan sukarela oleh manajemen. Pengungkapan sukarela dibutuhkan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham. Apabila informasi penting tidak diungkapkan oleh manajemen, pemegang saham tidak akan mengetahui bahwa perusahaan telah melakukan kecurangan yang dapat merugikan pemegang saham.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Alhazaimah, *et al* (2013) dengan mengambil beberapa variabel dan disesuaikan dengan tata kelola perusahaan yang ada di Indonesia. Peneliti juga melakukan beberapa pengembangan penelitian yang terdiri dari : (1) Sampel penelitian diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; (2) Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan variabel independen baru yaitu rapat komite audit; (3) Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan sukarela dan item pengungkapan sukarela diperoleh dari gabungan item-item pengungkapan Panditharathna dan Abeywardana (2016), Mutiva (2015), Consoni *et al.* (2015) dan Sehar *et al.* (2013), yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016.

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dengan sektor terbanyak dibandingkan perusahaan jenis lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana yang

dijabarkan oleh Saham Ok didalam situsnya [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com), perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 berjumlah 144 perusahaan yang terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Di lihat dari proses operasinya perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang banyak berhubungan dengan berbagai pihak (seperti pemasok, distributor, pelanggan, investor, kreditor, pesaing dan pihak lainnya) dengan kepentingan dan kebutuhan informasi yang berbeda-beda.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela ?
2. Bagaimana pengaruh rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela ?
3. Bagaimana pengaruh kompensasi dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela ?
4. Bagaimana pengaruh kompensasi direksi terhadap pengungkapan sukarela ?
5. Bagaimana pengaruh rapat komite audit terhadap pengungkapan sukarela ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela.
2. Untuk menganalisis pengaruh rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela.
3. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi direksi terhadap pengungkapan sukarela.
5. Untuk menganalisis pengaruh rapat komite audit terhadap pengungkapan sukarela.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang digunakan, beberapa penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian, seluruh proses, teknik analisis data, hasil dari pengujian seluruh hipotesis dan intepretasinya.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang ditujukan kepada pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian.

